



BERITA RESMI STATISTIK

No. 63/07/Th. XXVIII, 25 Juli 2025



Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2025

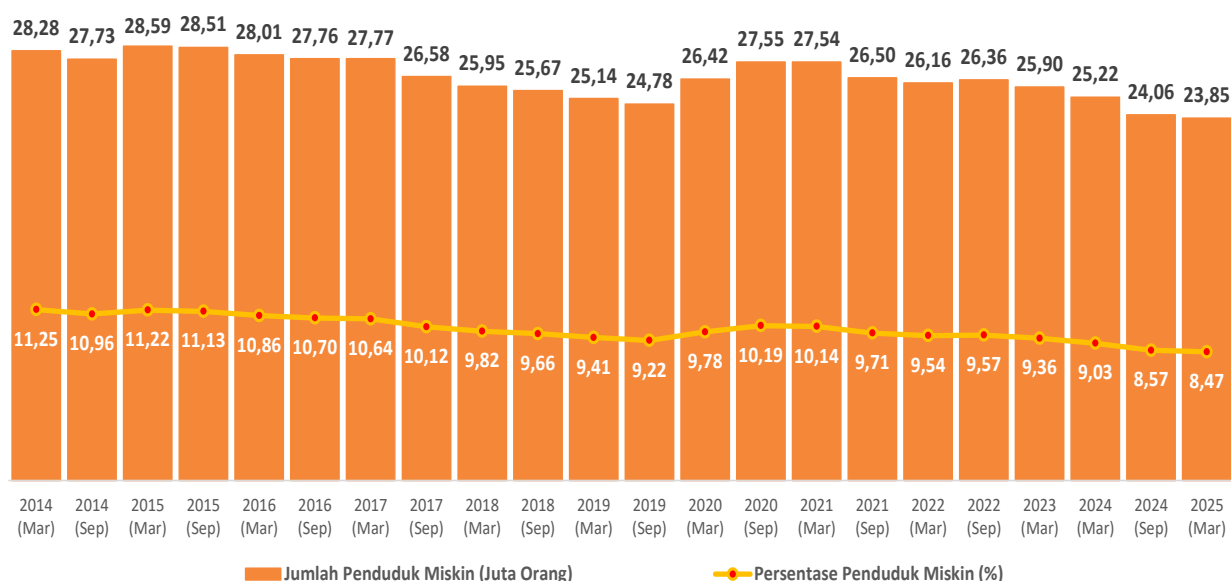
- Persentase Penduduk Miskin Maret 2025 turun menjadi 8,47 persen.



- Persentase penduduk miskin pada Maret 2025 sebesar 8,47 persen, menurun 0,10 persen poin terhadap September 2024 dan menurun 0,56 persen poin terhadap Maret 2024.
- Jumlah penduduk miskin pada Maret 2025 sebesar 23,85 juta orang, menurun 0,20 juta orang terhadap September 2024 dan menurun 1,37 juta orang terhadap Maret 2024.
- Persentase penduduk miskin perkotaan pada Maret 2025 sebesar 6,73 persen, naik dibandingkan September 2024 yang sebesar 6,66 persen. Sementara itu, persentase penduduk miskin perdesaan pada Maret 2025 sebesar 11,03 persen, menurun dibandingkan September 2024 yang sebesar 11,34 persen.
- Dibanding September 2024, jumlah penduduk miskin Maret 2025 perkotaan meningkat sebanyak 0,22 juta orang (dari 11,05 juta orang pada September 2024 menjadi 11,27 juta orang pada Maret 2025). Sementara itu, pada periode yang sama, jumlah penduduk miskin perdesaan justru menurun sebanyak 0,43 juta orang (dari 13,01 juta orang pada Maret 2025 menjadi 12,58 juta orang pada September 2024).
- Garis Kemiskinan pada Maret 2025 tercatat sebesar Rp609.160,00/kapita/bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp454.299,00 (74,58 persen) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp154.861,00 (25,42 persen).
- Pada Maret 2025, persentase penduduk miskin ekstrem yang mengacu pada garis kemiskinan ekstrem Bank Dunia sebesar US\$2,15 (2017 PPP) per kapita per hari, tercatat sebesar 0,85 persen atau 2,38 juta orang, menurun dibandingkan September 2024 yang sebesar 0,99 persen atau 2,78 juta orang.

1. Perkembangan Tingkat Kemiskinan, Maret 2014–Maret 2025

Secara umum, pada periode Maret 2014–Maret 2025, tingkat kemiskinan di Indonesia menunjukkan tren penurunan, baik dari sisi jumlah maupun persentase, kecuali pada Maret 2015, Maret 2020, September 2020, dan September 2022. Tingkat kemiskinan tertinggi selama periode tersebut tercatat pada Maret 2015, dengan jumlah penduduk miskin mencapai 28,59 juta orang atau 11,22 persen. Peningkatan jumlah dan persentase penduduk miskin pada Maret 2015 dan September 2022 terjadi akibat kenaikan harga bahan bakar minyak. Sementara itu, kenaikan pada Maret dan September 2020 disebabkan oleh pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia. Kondisi ekonomi yang mulai pulih pasca pandemi sejalan dengan perkembangan tingkat kemiskinan yang mulai berangsur turun dari Maret 2021 hingga Maret 2025. Perkembangan tingkat kemiskinan pada periode Maret 2014 hingga Maret 2025 ditampilkan pada Gambar 1.



Sumber: Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2014–Maret 2025

Gambar 1 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, Maret 2014–Maret 2025

2. Perkembangan Tingkat Kemiskinan, Maret 2024–Maret 2025

Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2025 mencapai 23,85 juta orang. Dibandingkan September 2024, jumlah penduduk miskin menurun 0,20 juta orang. Sementara jika dibandingkan dengan Maret 2024, jumlah penduduk miskin menurun sebanyak 1,37 juta orang. Persentase penduduk miskin pada Maret 2025 tercatat sebesar 8,47 persen, menurun 0,10 persen poin terhadap September 2024 dan menurun 0,56 persen poin terhadap Maret 2024.

Berdasarkan daerah tempat tinggal, pada periode September 2024–Maret 2025, jumlah penduduk miskin perkotaan meningkat sebesar 0,22 juta orang sedangkan di perdesaan turun sebesar 0,43 juta orang. Persentase kemiskinan di perkotaan naik dari 6,66 persen menjadi 6,73 persen. Sementara itu, di perdesaan turun dari 11,34 persen menjadi 11,03 persen.

Selain kemiskinan nasional, BPS juga menghitung kemiskinan ekstrem berdasarkan standar Bank Dunia, yaitu garis kemiskinan sebesar US\$2,15 (2017 PPP) per kapita per hari. Pada Maret 2025, persentase penduduk miskin ekstrem tercatat sebesar 0,85 persen atau sekitar

2,38 juta orang, menurun dibandingkan September 2024 yang sebesar 0,99 persen atau 2,78 juta orang.

Tabel 1 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Daerah, Maret 2024–Maret 2025

Daerah/Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (juta orang)	Persentase Penduduk Miskin (%)
(1)	(2)	(3)
Perkotaan		
Maret 2024	11,64	7,09
September 2024	11,05	6,66
Maret 2025	11,27	6,73
Perdesaan		
Maret 2024	13,58	11,79
September 2024	13,01	11,34
Maret 2025	12,58	11,03
Total		
Maret 2024	25,22	9,03
September 2024	24,06	8,57
Maret 2025	23,85	8,47

Sumber: Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2024, September 2024, dan Maret 2025

3. Persentase dan Jumlah Penduduk Miskin Menurut Pulau pada Maret 2025

Tabel 2 menunjukkan persentase dan jumlah penduduk miskin menurut pulau pada Maret 2025. Terlihat bahwa persentase penduduk miskin terbesar berada di wilayah Pulau Maluku dan Papua, yaitu sebesar 18,90 persen. Sementara itu, persentase penduduk miskin terendah berada di Pulau Kalimantan, yaitu sebesar 5,15 persen. Namun demikian, dari sisi jumlah, sebagian besar penduduk miskin masih berada di Pulau Jawa (12,56 juta orang) sedangkan jumlah penduduk miskin terendah berada di Pulau Kalimantan (0,89 juta orang).

Tabel 2 Persentase dan Jumlah Penduduk Miskin Menurut Pulau, Maret 2025

Pulau	Persentase Penduduk Miskin (%)			Jumlah Penduduk Miskin (juta orang)		
	Perkotaan	Perdesaan	Total	Perkotaan	Perdesaan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Sumatera	6,88	9,38	8,22	1,99	3,15	5,14
Jawa	6,95	10,43	7,99	7,65	4,91	12,56
Bali dan Nusa Tenggara	7,39	16,38	11,93	0,59	1,33	1,92
Kalimantan	4,30	6,03	5,15	0,38	0,51	0,89
Sulawesi	5,46	11,67	8,96	0,49	1,36	1,85
Maluku dan Papua	6,16	25,94	18,90	0,17	1,32	1,49
Indonesia	6,73	11,03	8,47	11,27	12,58	23,85

Sumber: Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Maret 2025

4. Perkembangan Garis Kemiskinan, Maret 2024–Maret 2025

Garis Kemiskinan merupakan suatu nilai pengeluaran minimum kebutuhan makanan dan bukan makanan yang harus dipenuhi agar tidak dikategorikan miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Tabel 3 menyajikan perkembangan garis kemiskinan pada Maret 2024 sampai dengan Maret 2025.

Garis Kemiskinan pada Maret 2025 adalah sebesar Rp609.160,00 per kapita per bulan.

Tabel 3 Garis Kemiskinan dan Perkembangannya Menurut Daerah, Maret 2024–Maret 2025

Daerah/Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bulan)		
	Makanan	Bukan Makanan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Perkotaan			
Maret 2024	441.394	160.477	601.871
September 2024	453.120	162.643	615.763
Maret 2025	463.801	165.760	629.561
Perubahan Mar'24–Mar'25(%)	5,08	3,29	4,60
Perubahan Sept'24–Mar'25(%)	2,36	1,92	2,24
Perdesaan			
Maret 2024	424.160	132.714	556.874
September 2024	430.508	136.147	566.655
Maret 2025	441.494	138.855	580.349
Perubahan Mar'24–Mar'25(%)	4,09	4,63	4,22
Perubahan Sept'24–Mar'25(%)	2,55	1,99	2,42
Total			
Maret 2024	433.906	149.026	582.932
September 2024	443.433	151.809	595.242
Maret 2025	454.299	154.861	609.160
Perubahan Mar'24–Mar'25(%)	4,70	3,92	4,50
Perubahan Sept'24–Mar'25(%)	2,45	2,01	2,34

Sumber: Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2024, September 2024, dan Maret 2025

Dibandingkan September 2024, Garis Kemiskinan naik sebesar 2,34 persen. Sementara jika dibandingkan Maret 2024, terjadi kenaikan sebesar 4,50 persen.

Dengan memperhatikan komponen Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM), terlihat pada Tabel 4 bahwa peranan komoditas makanan masih jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditas bukan makanan. Besarnya sumbangan GKM terhadap GK pada Maret 2025 di perkotaan sebesar 73,67 persen dan di perdesaan sebesar 76,07 persen.

Pada Maret 2025, komoditas makanan yang memberikan sumbangan terbesar pada GK, baik di perkotaan maupun di perdesaan, pada umumnya hampir sama. Beras masih memberi sumbangan terbesar, yakni sebesar 21,06 persen di perkotaan dan 24,91 persen di perdesaan. Rokok kretek filter memberikan sumbangan terbesar kedua terhadap GK (10,72 persen di perkotaan dan 9,99 persen di perdesaan). Komoditas lainnya adalah telur ayam ras (4,50 persen di perkotaan dan 3,62 persen di perdesaan), daging ayam ras (4,22 persen di perkotaan dan 2,98 persen di perdesaan), mie instan (2,47 persen di perkotaan dan 2,08 persen di perdesaan), kopi bubuk & kopi instan (2,29 persen di perkotaan dan 2,16 persen di perdesaan), dan seterusnya. Komoditas bukan makanan yang memberikan sumbangan terbesar, baik pada GK perkotaan dan perdesaan, adalah perumahan (9,11 persen di perkotaan dan 8,99 persen di perdesaan), bensin (3,06 persen di perkotaan dan 3,03 persen di perdesaan), dan listrik (2,58 persen di perkotaan dan 1,52 persen di perdesaan). Urutan selanjutnya adalah sumbangan dari pendidikan; perlengkapan mandi; perawatan kulit, muka, kuku, dan rambut; sabun cuci; serta kesehatan. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4 Daftar Komoditas yang Memberi Sumbangan Besar terhadap Garis Kemiskinan beserta Kontribusinya (persen), Maret 2025

Jenis Komoditas	Perkotaan	Jenis Komoditas	Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Makanan:	73,67	Makanan:	76,07
Beras	21,06	Beras	24,91
Rokok kretek filter	10,72	Rokok kretek filter	9,99
Telur ayam ras	4,50	Telur ayam ras	3,62
Daging ayam ras	4,22	Daging ayam ras	2,98
Mie instan	2,47	Gula pasir	2,40
Kopi bubuk & kopi instan (sachet)	2,29	Kopi bubuk & kopi instan (sachet)	2,16
Roti	2,09	Mie instan	2,08
Kue basah	1,98	Bawang merah	1,99
Bawang merah	1,79	Cabe rawit	1,86
Gula pasir	1,78	Kue basah	1,86
Tempe	1,77	Roti	1,84
Tahu	1,72	Tongkol/tuna/cakalang	1,72
lainnya	17,29	lainnya	18,66
Bukan Makanan:	26,33	Bukan Makanan:	23,93
Perumahan	9,11	Perumahan	8,99
Bensin	3,06	Bensin	3,03
Listrik	2,58	Listrik	1,52
Pendidikan	2,07	Pendidikan	1,25
Perlengkapan mandi	1,31	Perlengkapan mandi	1,15
Perawatan kulit, muka, kuku, rambut	0,79	Sabun cuci	0,76
Kesehatan	0,72	Perawatan kulit, muka, kuku, rambut	0,73
lainnya	6,68	lainnya	6,50

Sumber: Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Maret 2025

5. Garis Kemiskinan per Rumah Tangga Miskin, Maret 2025

Garis Kemiskinan per rumah tangga miskin adalah gambaran besarnya nilai rata-rata rupiah minimum yang harus dikeluarkan oleh rumah tangga untuk memenuhi kebutuhannya agar tidak dikategorikan miskin. Secara rata-rata, Garis Kemiskinan per rumah tangga miskin pada Maret 2025 adalah sebesar Rp2.875.235,00/bulan, naik sebesar 2,56 persen dibanding kondisi September 2024 yang sebesar Rp2.803.590,00/bulan.

Tabel 5 Garis Kemiskinan Rumah Tangga Miskin, September 2024 dan Maret 2025

Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bulan)	Rata-Rata Anggota Rumah Tangga Miskin	Garis Kemiskinan Rumah Tangga Miskin (Rp/rumah tangga/bulan)
(1)	(2)	(3)	(4)
September 2024	595.242	4,71	2.803.590
Maret 2025	609.160	4,72	2.875.235
Perubahan September 2024–Maret 2025 (%)	2,34	0,21	2,56

Sumber: Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), September 2024 dan Maret 2025

6. Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Keparahan Kemiskinan, Maret 2024–Maret 2025

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap Garis Kemiskinan. Indeks keparahan kemiskinan memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin.

Pada Maret 2025, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) sebesar 1,365; meningkat dibandingkan September 2024 yang sebesar 1,364 dan menurun dibandingkan Maret 2024 yang sebesar 1,461. Sementara itu, Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2) pada Maret 2025 sebesar 0,319; turun dibandingkan September 2024 yang sebesar 0,322 dan Maret 2024 yang sebesar 0,347 (lihat Tabel 6).

Apabila dibandingkan berdasarkan daerah, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2) perdesaan lebih tinggi daripada perkotaan. Pada Maret 2025, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) untuk perkotaan sebesar 1,061 sedangkan di perdesaan lebih tinggi, yaitu mencapai 1,811. Demikian pula untuk nilai Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2), di perkotaan nilainya sebesar 0,245 sedangkan di perdesaan lebih tinggi, yaitu mencapai 0,427.

Tabel 6 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2) di Indonesia Menurut Daerah, Maret 2024–Maret 2025

Tahun	Perkotaan	Perdesaan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1)			
Maret 2024	1,095	1,983	1,461
September 2024	0,981	1,918	1,364
Maret 2025	1,061	1,811	1,365
Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2)			
Maret 2024	0,252	0,483	0,347
September 2024	0,215	0,476	0,322
Maret 2025	0,245	0,427	0,319

Sumber: Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2024, September 2024, dan Maret 2025

7. Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan

Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan Maret 2025 antara lain adalah:

1. Ekonomi Indonesia Triwulan I-2025 masih tumbuh 4,87 persen (y-on-y).
2. Pengeluaran konsumsi rumah tangga pada Triwulan 1-2025 mencapai Rp1.741,0 triliun, meningkat 2,21 persen dibanding Triwulan III-2024 dan 4,89 persen dibanding Triwulan I-2024.
3. Nilai Tukar Petani (NTP) pada Februari 2025 sebesar 123,45 yang menunjukkan indeks harga yang diterima oleh petani lebih tinggi dibandingkan indeks harga yang dibayar oleh petani.
4. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Februari 2025 turun dibandingkan Agustus 2024. Penurunan lebih cepat pada wilayah perdesaan.
5. Jumlah setengah pengangguran di Perkotaan pada Februari 2025 meningkat 0,46 juta jiwa dibandingkan Agustus 2024.
6. Proporsi pekerja informal pada Februari 2025 sebesar 59,40 persen.
7. Perkembangan harga berbagai komoditas pada Februari 2025 dibandingkan Maret 2024 menunjukkan pola yang bervariasi. Beberapa komoditas pangan mengalami kenaikan harga, antara lain minyak goreng, cabai rawit, dan bawang putih. Sementara itu, komoditas yang mengalami penurunan harga antara lain beras, daging ayam ras, dan bawang merah.
8. Diskon tarif listrik sebesar 50 persen yang masih berlaku pada Februari 2025 turut memberikan andil terhadap terjadinya deflasi.

8. Penjelasan Teknis dan Sumber Data

1. Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur menurut Garis Kemiskinan.
2. Garis Kemiskinan (GK) terdiri dari dua komponen, yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM). Penghitungan Garis Kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan perdesaan.
3. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kkalori per kapita per hari. Paket komoditas kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditas (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll).
4. Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Paket komoditas kebutuhan dasar bukan makanan diwakili oleh 51 jenis komoditas di perkotaan dan 47 jenis komoditas di perdesaan.
5. Garis Kemiskinan per rumah tangga dihitung dari Garis Kemiskinan per kapita dikalikan dengan rata-rata banyaknya anggota rumah tangga pada rumah tangga miskin.
6. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan.
7. Sumber data utama yang dipakai untuk menghitung tingkat kemiskinan Maret 2025 (termasuk kemiskinan ekstrem) adalah data Susenas Konsumsi dan Pengeluaran Maret 2025. Pendataan Susenas Maret 2025 dilakukan pada Februari 2025. Hal ini dikarenakan Maret 2025 yang bertepatan dengan bulan Ramadhan yang dapat memengaruhi pola konsumsi rumah tangga.
8. Garis Kemiskinan Ekstrem (GKE) Maret 2025 mengacu pada standar kemiskinan ekstrem Bank Dunia yaitu sebesar US\$2,15 (2017 PPP) per kapita per hari. GKE ini dihitung dengan mengalikan GKE Maret 2024 dengan perubahan IHK periode Maret 2024–Februari 2025.

Tabel 7 Jumlah Penduduk Miskin Menurut Provinsi, September 2024 dan Maret 2025

Provinsi	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)					
	Perkotaan		Perdesaan		Total	
	Sep'24	Mar'25	Sep'24	Mar'25	Sep'24	Mar'25
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Aceh	168,71	174,18	550,25	530,51	718,96	704,69
2. Sumatera Utara	623,78	636,55	487,14	503,71	1.110,92	1.140,25
3. Sumatera Barat	125,69	119,45	189,75	192,90	315,43	312,35
4. Riau	183,28	173,52	289,76	287,45	473,04	460,96
5. Jambi	120,63	120,30	152,08	150,64	272,70	270,94
6. Sumatera Selatan	310,04	314,49	638,81	605,12	948,84	919,60
7. Bengkulu	86,71	87,39	174,44	165,58	261,15	252,97
8. Lampung	239,51	229,16	699,80	657,85	939,30	887,02
9. Kepulauan Bangka Belitung	37,09	35,68	41,49	42,03	78,58	77,71
10. Kepulauan Riau	102,23	101,34	22,72	15,94	124,96	117,28
11. DKI Jakarta	449,07	464,87	-	-	449,07	464,87
12. Jawa Barat	2.780,46	2.846,48	887,89	808,26	3.668,35	3.654,74
13. Jawa Tengah	1.683,75	1.746,72	1.712,59	1.619,97	3.396,34	3.366,69
14. DI Yogyakarta	316,81	321,04	113,66	104,77	430,47	425,82
15. Jawa Timur	1.589,12	1.641,18	2.304,70	2.234,70	3.893,82	3.875,88
16. Banten	606,52	627,88	170,98	144,90	777,49	772,78
17. Bali	112,93	112,17	63,29	61,07	176,21	173,24
18. Nusa Tenggara Barat	338,74	353,68	319,86	300,89	658,60	654,57
19. Nusa Tenggara Timur	126,91	121,85	981,02	966,93	1.107,94	1.088,78
20. Kalimantan Barat	94,82	92,90	239,17	238,05	333,99	330,95
21. Kalimantan Tengah	65,34	69,13	83,90	78,67	149,24	147,80
22. Kalimantan Selatan	81,22	78,47	98,98	94,25	180,20	172,72
23. Kalimantan Timur	118,19	112,08	93,69	87,63	211,88	199,71
24. Kalimantan Utara	25,06	25,56	16,05	17,01	41,11	42,57
25. Sulawesi Utara	59,45	62,62	113,85	111,22	173,30	173,84
26. Sulawesi Tengah	79,85	76,92	278,48	279,27	358,33	356,19
27. Sulawesi Selatan	228,59	227,84	483,17	470,29	711,77	698,13
28. Sulawesi Tenggara	75,77	71,53	229,50	232,90	305,27	304,43
29. Gorontalo	28,49	27,01	141,54	135,73	170,03	162,74
30. Sulawesi Barat	24,55	24,71	131,36	127,60	155,91	152,31
31. Maluku	38,83	37,16	255,16	250,60	293,99	287,76
32. Maluku Utara	24,21	23,13	55,48	54,14	79,69	77,27
33. Papua Barat	15,18	14,94	93,11	91,95	108,28	106,90
34. Papua Barat Daya	22,96	29,40	73,85	74,17	96,81	103,57
35. Papua	31,85	35,63	129,21	135,75	161,07	171,38
36. Papua Selatan	7,14	8,16	95,88	97,37	103,02	105,53
37. Papua Tengah	13,47	14,19	274,06	288,11	287,54	302,31
38. Papua Pegunungan	9,64	10,51	321,48	326,81	331,12	337,32
Indonesia	11.046,59	11.269,83	13.008,13	12.584,73	24.054,72	23.854,56

Sumber: Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) September 2024 dan Maret 2025

Tabel 8 Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi, September 2024 dan Maret 2025

Provinsi		Persentase Penduduk Miskin (%)					
		Perkotaan		Perdesaan		Total	
		Sep'24	Mar'25	Sep'24	Mar'25	Sep'24	Mar'25
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Aceh	8,37	8,54	14,99	14,44	12,64	12,33
2.	Sumatera Utara	7,01	7,10	7,44	7,71	7,19	7,36
3.	Sumatera Barat	4,16	3,91	6,79	6,93	5,42	5,35
4.	Riau	6,11	5,75	6,52	6,43	6,36	6,16
5.	Jambi	9,60	9,52	6,08	6,01	7,26	7,19
6.	Sumatera Selatan	9,02	9,10	11,43	10,79	10,51	10,15
7.	Bengkulu	12,32	12,34	12,63	11,95	12,52	12,08
8.	Lampung	7,91	7,49	12,04	11,32	10,62	10,00
9.	Kepulauan Bangka Belitung	4,09	3,89	6,49	6,59	5,08	5,00
10.	Kepulauan Riau	4,36	4,13	8,55	8,33	4,78	4,44
11.	DKI Jakarta	4,14	4,28	–	–	4,14	4,28
12.	Jawa Barat	6,65	6,76	8,85	8,15	7,08	7,02
13.	Jawa Tengah	8,83	9,10	10,45	9,92	9,58	9,48
14.	DI Yogyakarta	10,11	10,16	11,31	10,46	10,40	10,23
15.	Jawa Timur	6,83	7,00	13,19	12,86	9,56	9,50
16.	Banten	5,57	5,58	6,20	5,89	5,70	5,63
17.	Bali	3,32	3,27	5,11	4,97	3,80	3,72
18.	Nusa Tenggara Barat	11,64	12,02	12,21	11,51	11,91	11,78
19.	Nusa Tenggara Timur	8,11	7,68	23,02	22,66	19,02	18,60
20.	Kalimantan Barat	4,62	4,48	7,26	7,22	6,25	6,16
21.	Kalimantan Tengah	5,22	5,46	5,29	4,97	5,26	5,19
22.	Kalimantan Selatan	3,59	3,43	4,46	4,25	4,02	3,84
23.	Kalimantan Timur	4,41	4,16	8,00	7,48	5,51	5,17
24.	Kalimantan Utara	5,07	5,27	5,96	5,98	5,38	5,54
25.	Sulawesi Utara	4,07	4,25	10,14	9,95	6,70	6,71
26.	Sulawesi Tengah	7,34	6,98	12,90	12,93	11,04	10,92
27.	Sulawesi Selatan	5,21	5,14	10,11	9,88	7,77	7,60
28.	Sulawesi Tenggara	6,78	6,42	13,07	13,13	10,63	10,54
29.	Gorontalo	4,99	4,68	21,62	20,80	13,87	13,24
30.	Sulawesi Barat	8,33	8,35	11,32	10,94	10,71	10,41
31.	Maluku	4,59	4,36	25,08	24,61	15,78	15,38
32.	Maluku Utara	6,27	5,95	5,93	5,76	6,03	5,81
33.	Papua Barat	9,50	9,22	26,34	25,88	21,09	20,66
34.	Papua Barat Daya	8,03	8,98	25,90	29,71	16,95	17,95
35.	Papua	5,93	6,58	36,57	38,47	18,09	19,16
36.	Papua Selatan	3,65	4,12	28,47	28,86	19,35	19,71
37.	Papua Tengah	5,27	5,51	34,86	36,54	27,60	28,90
38.	Papua Pegunungan	12,11	13,00	31,00	31,36	29,66	30,03
Indonesia		6,66	6,73	11,34	11,03	8,57	8,47

Sumber: Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) September 2024 dan Maret 2025

Tabel 9 Garis Kemiskinan per Kapita Menurut Provinsi dan Daerah, September 2024 dan Maret 2025

Provinsi	Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bulan)					
	Perkotaan		Perdesaan		Total	
	Sep'24	Mar'25	Sep'24	Mar'25	Sep'24	Mar'25
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Aceh	704.200	716.522	645.687	655.435	665.855	676.247
2. Sumatera Utara	674.427	694.542	614.445	630.844	648.336	666.546
3. Sumatera Barat	731.235	753.614	697.052	704.232	714.991	729.806
4. Riau	746.476	758.174	673.431	683.064	702.620	713.117
5. Jambi	754.235	759.799	612.745	618.121	658.100	664.127
6. Sumatera Selatan	603.305	624.550	541.821	557.253	564.462	581.702
7. Bengkulu	742.765	754.967	642.620	650.887	672.816	683.820
8. Lampung	655.653	659.660	571.802	588.958	599.018	612.451
9. Kepulauan Bangka Belitung	903.322	926.156	938.001	995.150	917.673	956.833
10. Kepulauan Riau	812.294	835.161	764.885	797.450	807.602	832.410
11. DKI Jakarta	846.085	852.768	-	-	846.085	852.768
12. Jawa Barat	537.457	550.729	527.645	535.726	535.509	547.752
13. Jawa Tengah	532.913	546.576	508.298	527.934	521.093	537.812
14. DI Yogyakarta	642.099	653.421	531.516	545.206	613.370	626.363
15. Jawa Timur	565.284	576.188	525.955	534.771	547.751	558.029
16. Banten	684.205	700.646	600.404	611.976	667.403	684.232
17. Bali	600.260	631.180	526.833	542.858	580.306	607.847
18. Nusa Tenggara Barat	554.327	574.051	525.027	537.105	540.339	556.846
19. Nusa Tenggara Timur	645.346	666.633	495.180	508.645	533.944	549.607
20. Kalimantan Barat	659.658	669.721	581.931	595.174	611.320	622.882
21. Kalimantan Tengah	619.613	634.029	657.942	667.001	641.524	654.066
22. Kalimantan Selatan	658.002	662.876	629.413	637.314	644.107	650.675
23. Kalimantan Timur	862.414	876.210	833.539	843.168	853.997	866.193
24. Kalimantan Utara	904.171	921.520	823.347	829.827	876.375	884.970
25. Sulawesi Utara	522.165	546.021	498.100	510.678	511.710	530.304
26. Sulawesi Tengah	621.778	638.441	601.981	617.865	608.687	624.854
27. Sulawesi Selatan	491.078	502.530	447.672	456.048	467.991	477.966
28. Sulawesi Tenggara	493.453	520.957	460.567	467.814	473.343	488.171
29. Gorontalo	495.325	503.854	480.307	487.598	487.578	495.576
30. Sulawesi Barat	467.996	473.493	458.416	476.004	460.283	475.488
31. Maluku	760.478	781.403	722.619	738.005	739.818	757.600
32. Maluku Utara	677.285	711.096	623.790	642.614	639.337	662.397
33. Papua Barat	944.616	959.457	753.746	769.107	816.613	831.001
34. Papua Barat Daya	810.708	835.719	772.812	782.579	791.570	812.630
35. Papua	787.183	797.056	593.469	599.432	708.811	714.365
36. Papua Selatan	681.536	703.304	454.091	472.503	548.646	566.052
37. Papua Tengah	959.039	1.011.257	745.530	757.877	798.333	817.834
38. Papua Pegunungan	1.377.464	1.454.372	1.058.697	1.115.070	1.079.160	1.132.178
Indonesia	615.763	629.561	566.655	580.349	595.242	609.160

Sumber: Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) September 2024 dan Maret 2025

Tabel 10 Garis Kemiskinan per Rumah Tangga Miskin Menurut Provinsi dan Daerah, September 2024 dan Maret 2025

Provinsi		September 2024			Maret 2025		
		GK per Kapita	Rata-Rata Jumlah ART pada RT Miskin	GK per RT Miskin	GK per Kapita	Rata-Rata Jumlah ART pada RT Miskin	GK per RT Miskin
(1)		(5)	(6)	(7)	(5)	(6)	(7)
1.	Aceh	665.855	4,87	3.242.714	676.247	5,19	3.509.722
2.	Sumatera Utara	648.336	5,47	3.546.398	666.546	5,36	3.572.687
3.	Sumatera Barat	714.991	5,23	3.739.403	729.806	5,34	3.897.164
4.	Riau	702.620	5,31	3.730.912	713.117	5,51	3.929.275
5.	Jambi	658.100	4,67	3.073.327	664.127	4,95	3.287.429
6.	Sumatera Selatan	564.462	5,04	2.844.888	581.702	4,88	2.838.706
7.	Bengkulu	672.816	4,83	3.249.701	683.820	4,59	3.138.734
8.	Lampung	599.018	4,71	2.821.375	612.451	4,69	2.872.395
9.	Kepulauan Bangka Belitung	917.673	4,59	4.212.119	956.833	4,95	4.736.323
10.	Kepulauan Riau	807.602	4,57	3.690.741	832.410	4,84	4.028.864
11.	DKI Jakarta	846.085	5,01	4.238.886	852.768	4,90	4.178.563
12.	Jawa Barat	535.509	4,63	2.479.407	547.752	4,48	2.453.929
13.	Jawa Tengah	521.093	4,45	2.318.864	537.812	4,40	2.366.373
14.	DI Yogyakarta	613.370	4,32	2.649.758	626.363	4,26	2.668.306
15.	Jawa Timur	547.751	4,27	2.338.897	558.029	4,24	2.366.043
16.	Banten	667.403	5,32	3.550.584	684.232	5,22	3.571.691
17.	Bali	580.306	4,21	2.443.088	607.847	4,89	2.972.372
18.	Nusa Tenggara Barat	540.339	4,13	2.231.600	556.846	4,27	2.377.732
19.	Nusa Tenggara Timur	533.944	5,81	3.102.215	549.607	5,59	3.072.303
20.	Kalimantan Barat	611.320	5,54	3.386.713	622.882	5,19	3.232.758
21.	Kalimantan Tengah	641.524	4,68	3.002.332	654.066	4,70	3.074.110
22.	Kalimantan Selatan	644.107	4,90	3.156.124	650.675	4,63	3.012.625
23.	Kalimantan Timur	853.997	5,32	4.543.264	866.193	5,24	4.538.851
24.	Kalimantan Utara	876.375	6,90	6.046.988	884.970	5,89	5.212.473
25.	Sulawesi Utara	511.710	5,24	2.681.360	530.304	5,26	2.789.399
26.	Sulawesi Tengah	608.687	5,43	3.305.170	624.854	5,25	3.280.484
27.	Sulawesi Selatan	467.991	5,36	2.508.432	477.966	5,23	2.499.762
28.	Sulawesi Tenggara	473.343	5,05	2.390.382	488.171	5,48	2.675.177
29.	Gorontalo	487.578	5,82	2.837.704	495.576	5,24	2.596.818
30.	Sulawesi Barat	460.283	5,76	2.651.230	475.488	5,31	2.524.841
31.	Maluku	739.818	6,41	4.742.233	757.600	6,47	4.901.672
32.	Maluku Utara	639.337	6,22	3.976.676	662.397	5,83	3.861.775
33.	Papua Barat	816.613	4,14	3.380.778	831.001	5,89	4.894.596
34.	Papua Barat Daya	791.570	4,78	3.783.705	812.630	6,66	5.412.116
35.	Papua	708.811	4,17	2.955.742	714.365	5,93	4.236.184
36.	Papua Selatan	548.646	4,32	2.370.151	566.052	5,83	3.300.083
37.	Papua Tengah	798.333	3,44	2.746.266	817.834	4,47	3.655.718
38.	Papua Pegunungan	1.079.160	3,56	3.841.810	1.132.178	4,43	5.015.549
Indonesia		595.242	4,71	2.803.590	609.160	4,72	2.875.235

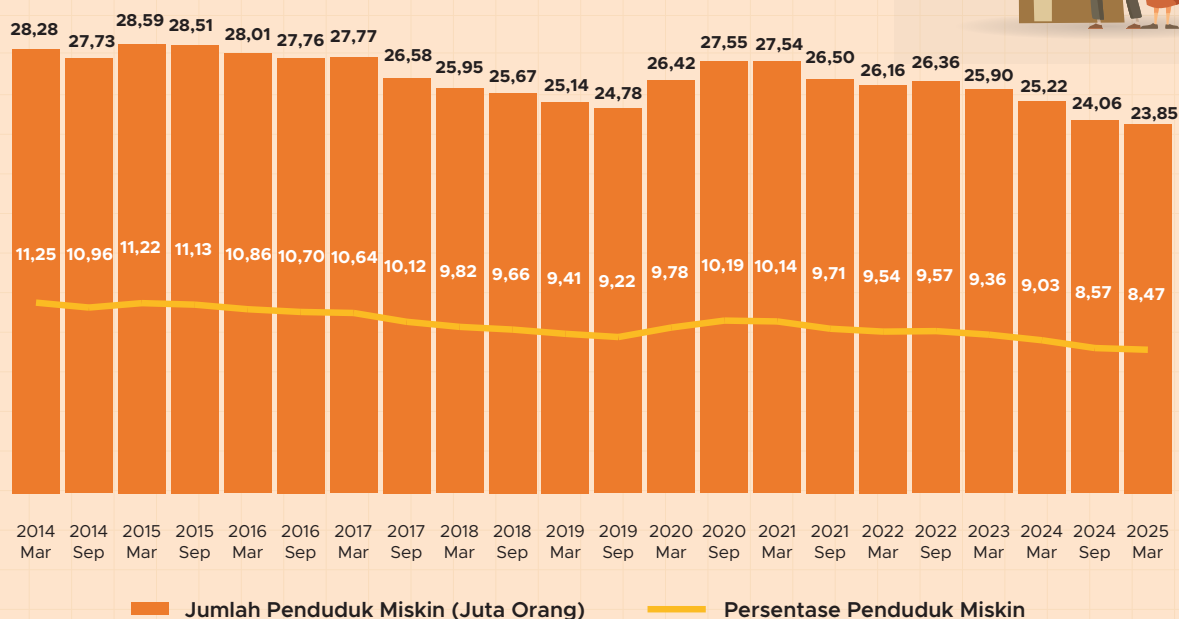
Sumber: Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) September 2024 dan Maret 2025

PROFIL KEMISKINAN DI INDONESIA, MARET 2025

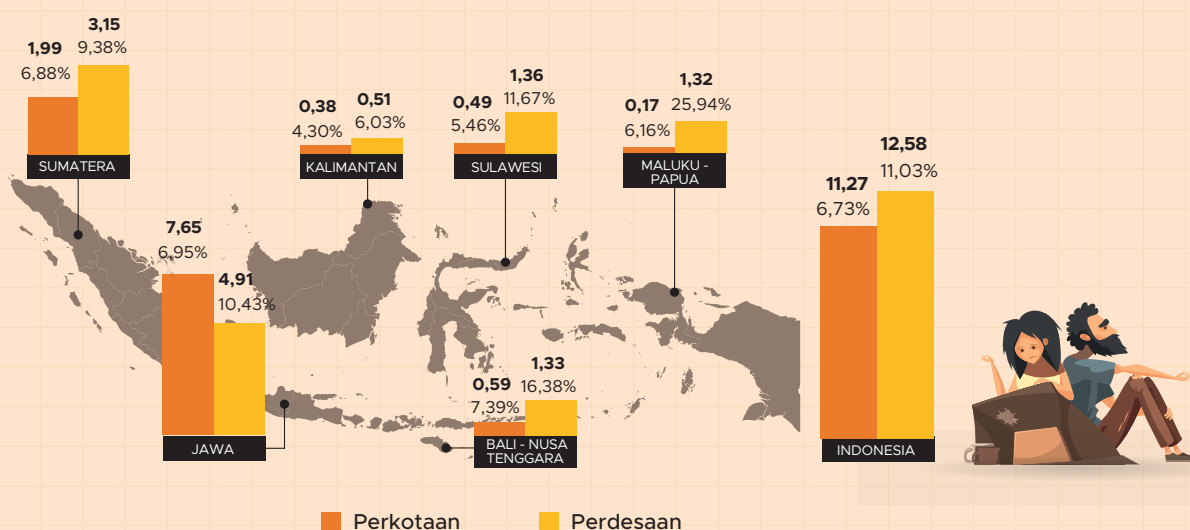
Berita Resmi Statistik No. 63/07/Th. XXVIII, 25 Juli 2025



Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, Maret 2014–Maret 2025



Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Pulau, Maret 2025

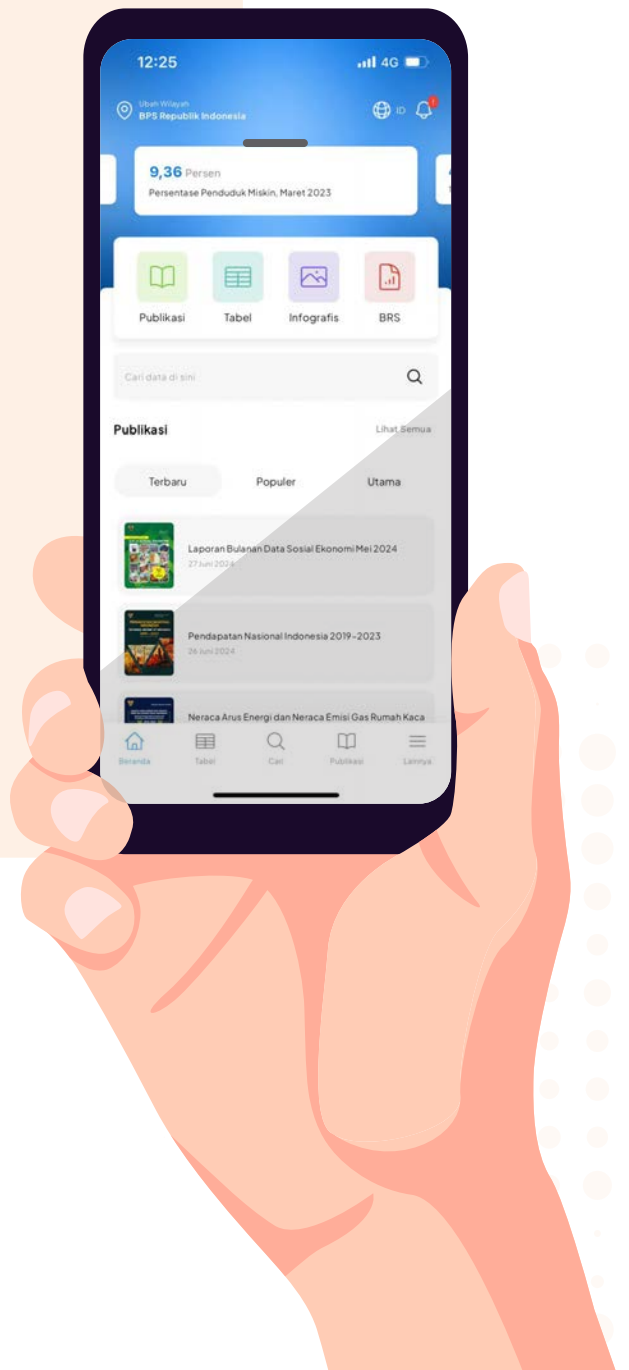


Gambar 2 Infografis Profil Kemiskinan di Indonesia, Maret 2025

AllStats BPS

untuk mengakses
data secara cepat di
gawai Anda

Publikasi, Berita Resmi Statistik,
Tabel Dinamis Data Series dan
Pelayanan Statistik Terpadu





Untuk informasi lebih lanjut silakan hubungi:



Dr. Nurma Midayanti, M.Ec.Dev
Direktur Statistik Ketahanan Sosial

☎ (021) 3810291-4, Ext. 4300

✉ nurma@bps.go.id

Untuk layanan perpustakaan, penjualan data mikro, publikasi elektronik, publikasi cetakan, dan peta digital wilayah kerja statistik sesuai peraturan yang berlaku maupun konsultasi statistik dapat menghubungi Pelayanan Statistik Terpadu (PST) di pst.bps.go.id

Konten Berita Resmi Statistik dilindungi oleh Undang-Undang, hak cipta melekat pada Badan Pusat Statistik. Dilarang mereproduksi dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik.



BADAN PUSAT STATISTIK

Jl. dr. Sutomo No. 6-8 Jakarta 10710

Telp: (021) 3841195, 3842508, 3810291-4, Fax: (021) 3857046

Homepage: <http://www.bps.go.id> E-mail: bps@bps.go.id

